

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sejak dibukanya perwakilan konsuler pada tahun 1966 dan perwakilan diplomatik pada 18 November 1973 di tiap-tiap negara, hubungan kenegaraan antara Korea Selatan dan Indonesia di berbagai bidang mengalami pasang surut. Setelah mengalami peningkatan yang cukup pesat di beberapa bidang di tahun 1980-an, pada pertengahan tahun 1990-an, hubungan Korea Selatan – Indonesia di bidang politik dan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis dengan adanya pergantian pemerintahan di kedua negara, yakni dari pemerintahan berbasis militer menjadi pemerintahan sipil ditambah dengan kondisi ekonomi yang krisis di kedua negara dalam waktu yang bersamaan. Krisis ekonomi yang melanda kedua negara tersebut juga telah mengakibatkan renggangnya hubungan kedua belah pihak di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Walaupun telah terjadi beberapa perubahan pada kedua negara, namun kedua negara menyadari bahwa mempererat kembali hubungan bilateral yang hampir putus akan berdampak positif pada perkembangan kerjasama di bidang politik, perdagangan, dan investasi, serta diikuti perkembangan budaya dan pariwisata di kedua negara.

Sebagai tindak lanjut dari hubungan yang dijalin oleh Korea Selatan dan Indonesia selama empat dasawarsa, pada tanggal 4 Desember 2006

dilakukan penandatanganan Deklarasi Kemitraan Bersama Mempromosikan Persahabatan dan Kerjasama di abad 21 atau yang lebih dikenal dengan *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* oleh presiden masing-masing negara. Pada kesempatan tersebut ditandatangani pula perjanjian kerjasama bidang nuklir untuk tujuan damai, kerjasama bidang pariwisata, bidang kehutanan, bidang pemberantasan korupsi, dan bidang perdagangan dan investasi.

Hubungan Indonesia dan Korea Selatan merupakan hubungan yang bersifat saling melengkapi. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, kapasitas tenaga kerja yang banyak dan murah serta ekonomi makro yang stabil, sedangkan Korea Selatan memiliki kapasitas teknologi canggih, modal dan pengelolaan manajemen yang baik.

Dengan menandatangani deklarasi tersebut dan membangun kemitraan yang strategis, kedua negara sangat berharap hubungan yang telah terjalin dapat meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua negara di berbagai bidang, terutama di bidang perdagangan dan investasi serta merealisasikan kesepakatan melipatgandakan investasi menjadi dua kali lipat pada tahun 2012.

Arti kata dari kemitraan sendiri adalah konsep atau wacana baru dalam sistem ekonomi Indonesia, dimana pengusaha besar dan kecil dapat melakukan kerjasama atau hubungan usaha yang saling menguntungkan. Pada

kemitraan ini diharapkan dapat menjawab persoalan kesenjangan antarpelaku ekonomi (pengusaha) besar dengan pengusaha kecil. Pola kemitraan yang terjadi secara alamiah sebenarnya telah terjadi di banyak negara, terutama di negara-negara maju. Motivasi kemitraan tersebut semata-mata karena bisnis untuk mengejar signal persaingan dan efisiensi usaha.

B. Tujuan Penelitian

Skripsi ini pada dasarnya merupakan karya tulis ilmiah sebagai hasil yang mendalam dan bersifat mandiri yang berisikan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Karya tulis ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesa yang dikemukakan dalam menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal diatas, penulis ingin menjelaskan perkembangan kerjasama antara pemerintah Korea Selatan dan Indonesia di bidang perdagangan dan investasi, serta kepentingan kedua negara membangun kemitraan strategis bersama tersebut.

Pada akhirnya penulis bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S-1) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Korea Selatan dengan Indonesia telah menjalin hubungan
kepercayaan sosial kedua negara menandatangani persetujuan pembukaan

hubungan diplomatik kenegaraan tingkat konsuler pada tahun 1966. Selama empat dasawarsa terakhir ini, hubungan ekonomi yang terjalin antara Korea Selatan dan Indonesia tidak sepenuhnya murni bersifat ekonomi. Sifat pemerintahan sangat mempengaruhi hubungan ekonomi kedua negara. Pada saat Korea dan Indonesia dibawah pemerintahan militeris, sebagai negara berkembang kedua pemerintahan sangat ingin meningkatkan kondisi perekonomian nasionalnya.¹ Persamaan tujuan dan sifat pemerintahan menjadikan kedua negara sangat cocok untuk bekerjasama.

Korea Selatan yang memiliki sumber daya alam yang sangat sedikit dan pasar dalam negeri yang sempit, tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengambil kebijakan ekonomi nasional yang mengarah ke luar negeri. Jika dibandingkan dengan kerjasama politik ekonomi timbal balik dengan dunia luar dalam tahun-tahun terakhir ini, bagi Korea Selatan, Indonesia adalah salah satu negara sasaran pengadaan kerjasama yang paling memberikan harapan.

Secara konkret, hubungan ekonomi dirintis sebagai jalan hubungan yang lebih luas, termasuk hubungan politik. Pada awalnya perhatian ekonomi pihak Korea Selatan kepada Indonesia terbatas pada sumber daya alam, khususnya kehutanan. Tetapi secara bertahap hubungan ini semakin meluas.

¹ Yang Seung Yoon, *40 Tahun (1966-2006) Hubungan Indonesia-Korea Selatan*, Yogyakarta: Gadjah

Kini sejumlah investor dari Korea Selatan menduduki tempat atas dalam beberapa manufaktur, seperti elektronika.

Dengan keberhasilan Korea Selatan dalam penyelenggaraan Olimpiade Asia pada tahun 2000 dan kejuaraan sepak bola Piala Dunia tahun 2002 serta prestasi yang ditunjukkan oleh Korea Selatan di berbagai bidang ini secara tidak langsung menaikkan citra diri dan mengangkat martabat bangsa Korea Selatan. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan yang cukup membuat Indonesia antusias untuk membangun kemitraan strategis dengan Republik Korea dan diwujudkan oleh kedua negara dalam penandatanganan Deklarasi Kemitraan Strategis Bersama Mempromosikan Persahabatan dan Kerjasama di abad 21 (*Joint Declaration between the Republic of Indonesia and Republic of Korea on Strategic Partnership to promote Friendship and Cooperation in the 21st*).²

Pada intinya dalam deklarasi yang ditandatangani oleh kedua kepala negara di Jakarta pada 4 Desember 2006 memuat jalinan hubungan Korea Selatan dan Indonesia dalam kerangka kemitraan strategis yang bertujuan untuk memperluas kerjasama yang menguntungkan antarkedua negara di berbagai bidang.

Dalam deklarasi tersebut kedua negara mengharapkan hal ini akan menjadi momentum untuk perkembangan lebih lanjut dalam hubungan Korea

Selatan dan Indonesia, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Korea Selatan dan Indonesia telah menjalin hubungan bilateral yang cukup erat dan diwarnai dengan dinamika atau pasang surut hubungan sejak dibukanya hubungan diplomatik tahun 1973 dan dalam bidang ekonomi, hubungan kedua negara tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.³

Sejak berakhirnya krisis 1997, banyak negara Asia seperti Thailand dan Korea Selatan telah bangkit dari keterpurukannya. Hal ini ditandai dari Bergeraknya sektor-sektor industri dan investasi di negara-negara tersebut. Sebagai contoh, investasi di Korea Selatan pasca krisis telah meningkat sebesar 39%. Dengan peningkatan angka pertumbuhan investasi ini, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dan dapat membantu suatu negara keluar dari krisis. Dalam bidang investasi, Indonesia mulai membuka diri terhadap penanaman modal asing seiring dengan diundangkannya Undang-Undang No.1 tahun 1967 dan sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).⁴

Dalam undang-undang ini investasi dipandang sebagai penopang pembangunan dimaknai sebagai proses ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi semata. Sejak awal, pemerintah orde baru berusaha menarik modal asing sebanyak mungkin untuk membiayai pembangunan perekonomian nasional.

³ Diterjemahkan dari www.mofat.go.kr/english/econtrade/links/index.jsp

⁴ Dikutip dari paper “Kerjasama Bilateral Bidang Investasi” oleh Direktorat Bilateral dan Multilateral sebagai Materi Kajian Kerjasama Bilateral dan Bahan Sosialisasi Kerjasama Bilateral

Indonesia menyadari pentingnya investasi langsung asing (PMA atau umumnya disebut Foreign Direct Investment) dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan perekonomian.

Dalam konsep pembangunan, tidak hanya investasi saja yang dipandang sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi, perdagangan pun merupakan salah satu sektor yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Di bidang penanaman modal, kerjasama yang terjalin antara Korea Selatan – Indonesia juga memberikan banyak keuntungan. Selama beberapa tahun terakhir ini, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang melakukan investasi di Indonesia setelah Inggris, Taiwan, Singapura, dan Jepang.

Korea Selatan merupakan negara maju dengan tingkat produk domestik bruto (PDB) sebesar 8.874 juta dolar AS pada tahun 2006. Tingkat pertumbuhan ekonominya 5% dengan surplus perdagangan 16.082 juta dolar AS. Di bidang investasi, investasi Korea Selatan di Indonesia meningkat tajam, jumlah persetujuan rencana investasi Korea Selatan di Indonesia dari tahun 2002 hingga pertengahan 2007 tercatat 1.494 proyek dengan total nilai 2,5 miliar dolar AS. Dari rencana tersebut, investasi yang direalisasikan sebanyak 505 proyek dengan total nilai 1,3 miliar dolar AS. Nilai penanaman modal Korea Selatan di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 13,5 miliar dolar AS

hingga menempati peringkat ketujuh negara yang paling banyak menanam modal di Indonesia.⁵

Begitu juga dalam bidang perdagangan, sebagai salah satu negara pengeksport LNG, Indonesia menjalin kerjasama dengan Korea Selatan dan memasok 6.124 juta ton atau 43,08% dari total konsumsi LNG Korea Selatan. Jumlah nilai perdagangan kedua negara mengalami peningkatan yang sangat berarti. Tahun 2006 misalnya, nilai perdagangan telah mencapai 10,7 miliar dollar AS, naik 100% dibandingkan dengan lima tahun lalu.⁶

Hubungan yang terjalin antara Korea Selatan – Indonesia di bidang ekonomi dapat dikatakan merupakan hubungan kenegaraan yang paling maju bila dibandingkan dengan hubungan-hubungan di bidang lain. Kedua negara merupakan salah satu diantara 10 negara rekan kerjasama ekonomi yang paling besar (Korea Selatan merupakan negara sasaran ekspor ke-4 bagi Indonesia, sedangkan Indonesia merupakan negara sasaran ekspor terbesar ke-5 bagi Korea Selatan).

Peningkatan kerjasama Indonesia – Korea Selatan pada hakikatnya merupakan realisasi kerjasama Selatan – Selatan yang pernah dicanangkan belasan tahun yang lalu. Kerjasama ini menjadi alternatif dari kerjasama Utara– Selatan yang sering diwarnai dengan ketidakseimbangan, karena kelompok

⁵ http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7056&coid=2&caid=25&gid=2

⁶ http://www.dandari.co.id/banten.php?nama=berita&on=detail_berita&id=1126

utara yang terdiri dari negara-negara industri maju yang cenderung memaksakan keinginannya.

Dengan menjalin kemitraan strategis bersama ini dan didukung dengan tiga unsur utama ekonomi yang dimiliki Indonesia (sumber daya alam, tenaga kerja, dan pasar domestik yang besar dan aktif) serta dua unsur utama lain yang dimiliki Korea Selatan (teknologi dan modal), kedua negara dapat saling mengisi satu sama lain. Dari hubungan timbal balik tersebut diharapkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi antara pemerintah Korea Selatan – Indonesia dapat lebih berkembang maju dalam berbagai bidang karena dinilai kerjasama ini berangkat dari pemikiran yang sama dan posisi yang relatif sederajat.

D. Pokok Permasalahan

Apa yang melatarbelakangi pemerintah Korea Selatan dan Indonesia dalam menjalin kemitraan strategis bersama 2006 di bidang perdagangan dan investasi?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Sebuah penulisan agar membentuk suatu analisa yang ilmiah sebagai hasil memahami suatu fenomena yang menjadi pusat perhatian, maka memerlukan alat bantu dalam kerangka pemikirannya. Kerangka dasar pemikiran merupakan kerangka kerja untuk mengkaji masalah masalah yang

berkaitan dengan menggunakan landasan teori serta menjawab pokok permasalahan kepada jawaban yang relevan dan kebenaran yang dimaksud.

Dalam penulisan ini, penulis mencoba mengangkat beberapa teori yang dianggap relevan. Dan sebagai kerangka dasar pemikiran dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa konsep, antara lain:

1. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang digunakan penulis untuk mengemukakan alasan kebijaksanaan luar negeri. Salah seorang ilmuwan yang mendukung penggunaan konsep ini adalah Hans J. Morgenthau. Menurutnya dalam mencapai kepentingan nasional diperlukan adanya kekuatan nasional. Kekuatan nasional tersebut meliputi geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan.⁷

Sedangkan Jack C. Plano dan Roy Olton, mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

“The fundamental and ultimate determinant that guides the decision makers of state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of these elements that constitute the state’s most vital needs. These include self preservations, independence, territorial integrity, military security, and economic well-

⁷ H J Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, disivisi oleh Kenneth W. Thompson edisi V. Yayasan Ober

being".⁸ (Tujuan yang fundamental atau faktor yang menentukan yang membimbing kebijakan suatu negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Konsep yang mencerminkan kebutuhan-kebutuhan vital yaitu kepentingan sebuah negara untuk melangsungkan pemerintahannya, berdiri sendiri (kemerdekaan), integritas teritorial, dan kesejahteraan ekonomi)

Untuk menganalisa kasus atau masalah di atas, konsep kepentingan nasional dapat dihubungkan dengan kerjasama investasi dan perdagangan Korea Selatan dan Indonesia. Peranannya akan dihadapkan pada berbagai macam pilihan yang masing-masing mengandung keuntungan dan kerugian, artinya Korea Selatan akan memilih alternatif yang tidak atau kurang merugikan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian Indonesia masih menjadi negara penerima modal asing dalam jumlah yang besar, tentunya dalam pengambilan keputusan harus betul-betul sesuai dengan tujuan nasional, sehingga jangan sampai keberadaan investor asing menimbulkan ketegangan di negara tuan rumah dengan seiring peningkatan peranan mereka dalam konteks ekonomi global. Perlu diingat bahwa bagaimanapun kepentingan nasional merupakan tolok ukur bagi suatu negara untuk menentukan kebijaksanaan politik luar negerinya dan untuk melangkah lebih jauh demi tercapainya keselarasan pembangunan ekonomi nasionalnya.

⁸ Jack C. Blom and Roy Oltan, *The International Relations Dictionary*, New York: Holt, Rinehart

2. Teori Kerjasama

Setiap orang pasti hidupnya bergantung dengan orang lain, tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain terutama dalam memenuhi kebutuhannya. Begitu juga halnya dengan kehidupan bernegara dalam sistem internasional. Sebuah negara tidak dapat lepas dari negara lain. Kepentingan dasar negara menjalin hubungan internasional dengan negara lain adalah kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Dalam memenuhi kebutuhannya negara-negara ini tentu harus saling mengadakan hubungan dengan negara lainnya yang dimanifestasikan dalam suatu kerjasama.

Seperti yang dikemukakan oleh K.J Holsti bahwa sebagian transaksi dan interaksi diantara negara-negara dalam sistem internasional dewasa ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah internasional, regional atau global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama.⁹ Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Kebanyakan transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung diantara dua negara yang

⁹ K.J Holsti, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, edisi keempat, jilid kedua, alih bahasa: M. Tahir Ashari, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1998, hal. 200

¹⁰ *Ibid*, hal. 210

¹¹ *Ibid*, hal.7

ekspansi, sedangkan dengan adanya penanaman modal di Indonesia, maka akan memperluas kesempatan kerja dan nantinya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Dalam bidang perdagangan, Indonesia masih menjadi mengekspor gas alam cair (LNG) terbesar kedua di Korea Selatan.

F. Hipotesa

Dalam menjalin kemitraan strategis bersama 2006, pemerintah Korea Selatan dan Indonesia memiliki kepentingan, yaitu kedua negara ingin meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskripsi analisis. Dalam penyajian data penulis mengumpulkan data-data dan teori yang berasal dari berbagai sumber berupa studi kepustakaan (library research), artikel, situs-situs internet, dan sumber informasi penunjang serta bahan-bahan kajian lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan skripsi ini.

H. Jangkauan Penelitian

Pembahasan ruang lingkup penelitian diperlukan untuk mempersempit fokus penelitian sehingga penelitian menjadi terarah dan tidak terlalu meluas pembahasannya, maka penulis membatasi penelitian dari tahun 2006 sampai sekarang.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah membahas persoalan dalam penulisan skripsi ini maka telah disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Dikemukakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia yang berisi tentang gambaran umum tentang Korea Selatan yang menjabarkan struktur pemerintahan, permasalahan perdagangan yang dihadapi Korea Selatan, dan kebijakan ekonomi luar negerinya; Gambaran umum tentang Indonesia, yang didalamnya membahas penanaman modal di Indonesia dan hal menurunnya investasi di Indonesia; dan Hubungan Korea Selatan dan Indonesia yang berisi tentang forum kerjasama antarkedua negara dan posisi Korea Selatan dan Indonesia dalam kancah internasional.

BAB III membahas mengenai potensi kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam kemitraan strategis bersama 2006 yang ditandatangani oleh kepala negara Korea Selatan dan Indonesia.

BAB IV menjelaskan kepentingan Korea Selatan dan Indonesia dalam membangun kemitraan strategis bersama 2006.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan.